

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses&Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil, 2002, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Satu Instrumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria Farida Indrawati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Negara Hukum dan Hukum Administasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Isra, 2006, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang.
- _____, 2009, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syaukani Imam dan Ahsin Tohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.92/PUU-X/2012

C. Internet / Skripsi

Andi Mattalata, Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Tiga Dekade Program Legisasi Nasional dan BPHN, (Jakarta, BPHN: 2004)

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidi, D.Prapti Rahayu, *Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional*, Artikel.pdf

Dwi Satya Ardiyanto, “Mengenal Prolegnas”
<http://doonukuneke.wordpress.com/2008/03/24/mengenal-prolegnas>.

Ditjenpp.kemenkumham.go.id

Fajri Nursyamsi, Menggagas Prolegnas Berkualitas, opini dalam www.pshk.com
dpr.go.id/.../ Arah kebijakan prolegnas 2010-2014 Oleh FX Soekarno, SH.

H.Ahmad Ubbe, S.H, M.H, "Instumen Prolegnas Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Terencana dan
Terpadu" <http://djpp.depkmham.go.id>.

idr.uin.antasari.ac.id

Moh Mahfud MD, "Konsistensi Materi Muatan Undang-Undang dengan
Konstitusi: Antisipasi Konstitusional Review", makalah disampaikan dalam
Lokakarya Program Legislasi Nasional 2009-2014, Departemen Hukum dan
HAM RI, BPHN, Bandung 10-12 Juni 2009, Hal 8-9.

Muh.Risnain, *Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi
Nasional: Rekomendasi Konseptual*, Jurnal Vol 4, No 3, Desember 2015 , hal,
400.

Nuru lGhufron, "Prolegnas, PR Pertama DPR,"
diunduh dari [http://suarapembaruan.com/index.php?
detail=News&id=11237](http://suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11237)

[https://nasional.tempo.co/read/1307814/5-aturan-omnibus-law-cipta-kerja-yang-
dianggap-rugikan-pekerja?page](https://nasional.tempo.co/read/1307814/5-aturan-omnibus-law-cipta-kerja-yang-dianggap-rugikan-pekerja?page).

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/13/15>.

<http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.

Vina Suci Afriyetti, 2012, *Kedudukan Program Legislasi Nasional Dalam
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*,

[https://www.bphn.go.id/data/documents/peranprolegns/dalamperencanaanpemban-
gunanhukum nasional.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/peranprolegns/dalamperencanaanpembangunanhukumnasional.pdf)

www.bappenas.go.id , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024.

www.kanalinfo.id

www.hukumonline.com